PERAN BAPEEDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DI KOTA SINGKAWANG

**Oleh:
RICO RINALDO
NIM. E42010008**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015
E-mail : ricorinaldo390@gmail.com

Abstrak

Badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk di setiap daerah otonom. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penulisan skripsi ini adalah bertujuan bagaimana peran Bappeda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Singkawang dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Singkawang. Judul skripsi ini diangkat untuk mengetahui apakah Bappeda benar-benar berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pemeliharaan pembangunan, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Singkawang.

Kata-kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Partisipasi dan Masyarakat

Abstrack

Body having a very important role in development planning is the Regional Development Planning Agency formed in each autonomous region. Regulation of the Minister of the Interior No. 54 of 2010 explained that the Regional Planning Board is planning element governance duties and coordinate the preparation, control, and evaluation of the implementation of development plans daerah. This paper is aimed at how the role of the Agency for improving public participation in development planning in Singkawang and to determine public participation in development planning in Singkawang. The title of this thesis was appointed to determine whether BAPPEDA actually serve to increase community participation in development planning and in the development of maintenance, so it can be input to the government to further increase community participation in development planning, especially the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in Singkawang.

Keywords: Development Planning, Participation and Community

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembangunan itu sendiri kepada usaha mencapai tujuan Bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menciptakan pembangunan yang baik dan optimal maka pemerintah harus melibatkan masyarakat selaku pengguna pembangunan.

Dalam pembangunan mempunyai tahapan-tahapan, tahapan yang paling awal dan paling vital dalam pembangunan adalah tahap perencanaan. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam suatu negara. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, disusun perencanaan pembangunan

daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional.

Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibentuk disetiap daerah otonom sebagaimana halnya di Kota Singkawang, di mana badan inilah yang akan membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan daerah di muat dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD dilakukan dengan mensinergikan pendekatan demokratis dan partisipatif serta pendekatan bottom up yang merupakan wujud nyata dari konsep perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif meletakkan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan didorong untuk lebih mengamabil peran penting dalam perencanaan pembangunan.

Penglibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/ Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan musrenbang kota. Pihak yang mewakili masyarakat dalam musrenbang ini mesti memiliki peran aktif dalam pelaksanaan Musrenbang. Peran aktif ini bukan hanya dilihat dari tingkat kehadiran tetapi dari tiap unsur masyarakat yang mewakili, kualitas keterwakilan masyarakat serta tingkat kualitas usulan program kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang yang dimaksud.

Berdasarkan hasil interview dengan SKPD terkait yaitu dari Bappeda dan pihak Kecamatan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Singkawang secara keseluruhan dinilai cukup baik dari tingkat kehadiran hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat

kota. meskipun terdapat 1 hingga 2 kecamatan tingkat kehadiran masyarakat masih dirasakan sangat kurang.

Kemudian namun kehadiran masyarakat ini masih belum mewakili unsur masyarakat yang hadir sesuai ketentuan serta tingkat kehadiran masyarakat kurang menunjukkan peran aktif dan kontribusi bagi perencanaan pembangunan. Usulan perencanaan pembangunan yang disampaikan masih terdapat bias terhadap kepentingan kelompok kecil bahkan pribadi. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang bukan hanya dilihat dari kehadiran tetapi dilihat dari usulan-usulan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat apakah sesuai dengan keinginan masyarakat atau hanya keinginan pribadi dan segelintir kepentingan kelompok. Dalam perencanaan pembangunan tahapan selanjutnya ialah pembangunan dan tahapan selanjutnya lagi adalah pemeliharaan pembangunan, nah tahap inilah masyarakat Kota Singkawang masih sangat kurang dalam hal pemeliharaan pembangunan baik yang di bangun oleh pemerintah maupun oleh usulan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti ingin lebih mendalami seberapa besar peran Bappeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan di Kota Singkawang.

2. Fokus Penelitian

Melihat konteks penelitian yang akan diteliti sangat luas, maka peneliti dalam hal ini membatasi atau memfokuskan penelitian terhadap peran Bappeda yang melibatkan masyarakat dalam partisipasi melalui pembangunan di Kota Singkawang, karena belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembangunan.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Peran Bappeda dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Pembangunan di Kota Singkawang?

4. Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2004: 51) Tujuan penelitian adalah rumusan

kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Bappeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan di Kota Singkawang
- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Singkawang

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan ilmu pemerintahan dalam mengelola pembangunan.

2. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya kepada daerah dalam mengelola partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai Adisasmita (2006: 41) pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan, dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Maka di dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dalam empat tahapan (Kaho 2007: 127) yaitu:

1. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan. Dalam tahap ini partisipasi masyarakat sangat mendasar sekali, terutama karena putusan politik yang

diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindakan selanjutnya dari tahap pertama, partisipasi dalam pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikutserta dalam member kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan

3. Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan.

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka dalam tahap ini masyarakat secara bersama akan menikmati hasil pembangunan dengan adil tanpa ada pengecualian. Setiap masyarakat akan mendapatkan bagian sebesar kontribusi atau pengorbanan yang diberikan. Manfaat yang dapat diterima dalam pembangunan ini yaitu mamfaat

materialnya; mamfaat sosialnya; dan mamfaat pribadi.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Suatu kegiatan dapat dinilai apabila memberi mamfaat yang sepantasnya bagi masyarakat. Maka dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan masyarakat menjadi hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada.

5. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2007) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan kembali kondisi nyata yang ada di lapangan. Peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui kejadian sebenarnya di lapangan. Karena dari pihak pemerintah dan masyarakat jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan pasti berbeda.

Rancangan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Etnometodologi karena menurut Saryono (2011) pendekatan

etnomonologi berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang dan menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memahami kinerja Bappeda dalam melibatkan masyarakat sekitar.

Pada penelitian ini adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a. Melakukan penelitian pendahuluan (*pre survey*)

Sebelum menulis usulan penelitian, terlebih dahulu akan dilakukan *pre survey*, langkah ini dilakukan sebagai langkah awal bagi peneliti untuk mengetahui kondisi lapangan yang akan diteliti sehingga mendapat modal awal untuk dijadikan sebagai bahan usulan penelitian.

b. Membuat Usulan Penelitian

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengajukan rencana penelitian kepada pihak Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan izin pelaksanaan penelitian.

c. Pengambilan Data Sekunder dan Primer

Setelah mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian, langkah selanjutnya adalah pengambilan data sekunder dan primer. Pada pengambilan data primer, peneliti langsung menganalisis pada hari itu juga, artinya pengambilan dan analisis dilakukan pada hari yang bersamaan setelah melakukan observasi atau wawancara.

d. Membuat Laporan Penelitian (Skripsi)

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapat adalah membuat laporan penelitian (Skripsi). Dalam laporan penelitian ini, dimuat pembahasan mengenai temuan yang telah dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan di analisis. Pada akhir laporan penelitian ini memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Subjek dan Objek yang diteliti dan kepada pihak terkait lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai peran Bappeda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dikota Singkawang. Penelitian ini telah dilakukan dengan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak, yaitu pihak kepala BAPPEDA dan masyarakat yaitu ketua RT 03 RW 06 kelurahan Pasiran kecamatan Singkawang Barat, Ketua RT 17 RW 06 kecamatan Singkawang Tengah dan masyarakat setempat di Kecamatan Singkawang Selatan. Wawancara kepada pihak masyarakat yaitu ketua RT dan masyarakat untuk mengetahui apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan pembangun di kota Singkawang. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi pada drainase (Saluran Air), taman kota dan jalan di kota Singkawang.

Pada saat musrenbang banyak yang dihadirkan seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan para Ketua RT. Hal yang diharapkan adalah masyarakat dapat berperan aktif dalam membuat

perencanaan pembangunan, forum dimana masyarakat bisa mengusulkan ide-ide atau pendapat-pendapat serta saran terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di kota Singkawang. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori Kaho untuk melihat tahapan-tahapan dimana partisipasi masyarakat dibagi dalam empat tahapan

Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan dan Partisipasi dalam Evaluasi. Dalam keempat tahapan tersebut partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan masyarakat Kota Singkawang sangat memanfaatkan hasil pembangunan tersebut, dimana ada pemanfaatan pasti ada pemeliharaan nah pemeliharaan tersebut sangatlah kurang dan usulan usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sangat mementingkan diri sendiri seharusnya untuk semua masyarakat.

Dalam evaluasi masyarakat hanya bisa berkomentar dari segi kualitas dan itupun hanya antar individu, seharusnya evaluasi itu sendiri pemerintah harus membangun sebuah

forum dimana masyarakat bisa mengevaluasi dan memberi masukan secara sah, karena pembangunan tersebut adalah untuk masyarakat itu sendiri oleh sebab itu baik tidaknya suatu pembangunan masyarakat lah yang akan merasakan hal tersebut.

2. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian dengan judul “Peran Bappeda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan di Kota Singkawang” masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan peneliti dalam memaparkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama berada di lapangan. Keterbatasan waktu penelitian juga merupakan hal yang menjadi permasalahan peneliti didalam melakukan pengumpulan data. Peneliti merasa kurang maksimal dalam melakukan penelitian karena peneliti tidak menggali lebih dalam lagi mengenai informasi yang sebenarnya masih banyak untuk dipertanyakan. Keterbatasan peneliti dalam merangkai kalimat yang baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar sehingga untuk menuangkan pemikiran

dalam bentuk tulisan cukup menyulitkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Saryono. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta cv.

Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan.
- Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RICO RINALDO
NIM / Periode lulus : E42010088 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : ricorinaldo390@gmail.com / 089693413333

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN BAPPEDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MELALUI PEMBANGUNAN DI KOTA SINGKAWANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....*IP*.....

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP . 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Januari 2015

(RICO RINALDO)